

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran PPKn Kelas XI
Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila



Guru :

Fifin Mulyasari, S.Pd

Identitas Siswa

Nama :

Kelas :

SMA NEGERI 10 PALEMBANG

Jl. Srijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Materi

PERIODISASI PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Indikator indikator suatu negara demokratis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya

2. Rotasi kekuasaan

Peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, serta dilakukan secara teratur dan damai

3. Rekrutmen politik yang terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut

4. Pemilihan umum

Pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya

5. Pemenuhan hak-hak dasar

Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas

Pelaksanaan Demokrasi

1. Pelaksanaan demokrasi Pada kurun waktu tahun 1945 - 1949, masa Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama

Pada masa ini Indonesia adalah sebuah negara yang baru saja merdeka. Banyak sekali tantangan dalam penerapan demokrasi, salah satunya terlihat dari banyaknya perubahan dalam ketatanegaraan:

- a. Tanggal 16 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat No.X/1945 yang memberikan kewenangan kepada BP-KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN
- b. Tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat pemerintah tentang kebebasan mendirikan partai politik
- c. Dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi kabinet parlementer. Hal

ini berdasarkan asas-asas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, dalam kabinet ini menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)

2. Pelaksanaan demokrasi Pada kurun waktu tahun 1949 - 1950, masa konstitusi RIS

Pada masa ini, terjadi perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD RIS. Perubahan konstitusi membuat Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi liberal tidak berlangsung lama karena tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

3. Pelaksanaan demokrasi Pada kurun waktu tahun 1950 - 1959, masa UUDS 1950

Menurut UUDS 1950, pemerintah berdasarkan sistem parlementer dengan demokrasi liberal. Pada masa ini bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Namun lembaga konstituante yang diberi tugas untuk membentuk UUD tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan konflik antar partai dalam tubuh konstituante. Kondisi ini membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, presiden mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pembubaran konstituante
- 2) Berlakunya kembali UUD 1945 dan UUD sementara tahun 1950 tidak berlaku
- 3) Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS

4. Pelaksanaan demokrasi Pada kurun waktu tahun 1959 - 1966, masa Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat UUD 1945 diberlakukan kembali. Perubahan ini diiringi juga oleh kebijakan tentang demokrasi yang berlaku yaitu demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa. Namun identik dengan demokrasi Pancasila. Hal yang dijadikan landasan penerapannya adalah sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Pada prakteknya, kata terpimpin diartikan sebagai dipimpin oleh presiden. Hal tersebut menyebabkan terjadinya Pemusatan kekuasaan ditangan presiden. Namun kondisi politik, keamanan, dan ekonomi Malah semakin memburuk keadaan ini diperparah dengan tindakan PKI yang melakukan pemberontakan. Oleh sebab itu, negara kita akhirnya memberlakukan kembali demokrasi Pancasila.

5. Pelaksanaan demokrasi Pada kurun waktu tahun 1966 - 1998

Pemerintahan orde baru mengadakan perbaikan dengan berusaha menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Namun lamanya presiden berkuasa membuat kekuasaan sangat sentralistik serta mendominasi baik suprastruktur

maupun infrastruktur. Kondisi ini diperparah dengan maraknya budaya KKN yang memicu krisis aspek kehidupan bangsa, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan munculnya gejolak sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Maka dari itu, rakyat menuntut reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya. Akhirnya muncullah gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya orde baru pada tanggal 21 Mei 1998.

6. Pelaksanaan demokrasi Pada kurun waktu tahun 1998 sampai sekarang

Gerakan reformasi pada hakekatnya merupakan suatu gerakan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang dan mengembalikannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Oleh sebab itu, gerakan reformasi harus dilaksanakan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita. Melalui gerakan reformasi diharapkan terjadi perubahan-perubahan dalam bidang politik. Adanya pembagian kewenangan secara tegas antar kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), peran serta masyarakat semakin meningkat, dan berkurangnya dominasi pemerintah. Demokrasi yang berlaku masa ini adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Latihan

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Berilah penjelasan
2. Bagaimana hubungan antara negara demokrasi dengan sila ke 4 Pancasila? Berilah penjelasan

Jawaban:

1.	
2.	

--	--